

## ABSTRAK

SAHRUL AZHAR SAHBUDDIN, 12103193191, Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Indonesia Ilegal Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Kasus Di Kabupaten Tulungagung), Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, 2023, Pembimbing: Muksin, M.H.

**Kata Kunci:** Perlindungan Hukum, PMI ilegal, Kabupaten Tulungagung.

Penelitian ini dilatar belakangi oleh belum adanya perlindungan hukum terhadap pekerja migran Indonesia ilegal yang sudah berangkat ke luar negeri. Dengan tidak adanya perlindungan hukum tersebut, mengakibatkan pekerja migran Indonesia mengalami berbagai macam kejahatan dan kekerasan internasional. Tidak hanya itu, dengan tidak adanya perlindungan hukum yang didapatkan dapat mengancam hak asasi manusia dari para pekerja migran Indonesia ilegal tersebut. Meskipun pekerja migran tersebut ilegal, namun harus tetap mendapat perlindungan hukum karena pekerja migran Indonesia juga merupakan warga negara Indonesia yang memiliki hak yang sama di Indonesia.

Fokus penelitian ini tentang perlindungan hukum apa saja yang didapatkan oleh pekerja migran Indonesia ilegal terutama pekerja migran yang berasal dari Kabupaten Tulungagung dengan perspektif fiqh siyasah, yaitu tentang bagaimana strategi dan upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum terhadap pekerja migran ilegal, bagaimana perlindungan hukum yang diterima pekerja migran Indonesia ilegal di Kabupaten Tulungagung, dan bagaimana perlindungan hukum terhadap pekerja migran Indonesia ilegal menurut siyasah dusturiyah. Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana strategi dan upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum bagi Pekerja Migran Indonesia Ilegal di luar negeri. Kemudian untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum yang diterima oleh pekerja migran Indonesia ilegal khususnya di Kabupaten Tulungagung, juga untuk memahami perlindungan hukum terhadap pekerja migran indonesia ilegal menurut siyasah dusturiyah.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris, dengan menggunakan metode penelitian kualitatif serta menggunakan pendekatan deskriptif dan survei, dengan lokasi penelitian berada di Kabupaten Tulungagung. Dengan Teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara dan dokumentasi. Tidak hanya itu, dalam hal Teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Kemudian untuk pengecekan keabsahan data dilakukan dengan cara triangulasi sumber, yaitu membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, *pertama* strategi dan upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum kepada PMI ilegal di Kabupaten Tulungagung meliputi, a) pemberian program pemutihan terhadap pengurusan dokumen bagi PMI ilegal, b) seminar (pemahaman kepada

masyarakat), c) pemberian kompetensi kerja untuk meningkatkan peluang mendapatkan pekerjaan di dalam negeri maupun di luar negeri, dan d) bekerjasama dengan perusahaan penempatan tenaga kerja Indonesia swasta (PPTKIS) dalam hal menjadikan PMI yang berangkat merupakan PMI legal semua. Hal itu dilakukan supaya seluruh PMI bisa mendapatkan perlindungan hukum yang jelas dan tidak menjadi korban dari kejahatan maupun kekerasan internasional. *Kedua*, perlindungan hukum yang diterima oleh PMI ilegal di Kabupaten Tulungagung untuk saat ini masih belum ada, karena belum ada data yang menyatakan berapa jumlah pasti dari PMI ilegal. Sehingga PMI ilegal harus berusaha mandiri untuk mendapatkan perlindungan hukum atau menunggu pemerintah Indonesia untuk memberikan perlindungan hukum. *Ketiga*, berdasarkan perspektif fiqh siyasah perlindungan hukum terhadap PMI ilegal di Kabupaten Tulungagung merupakan suatu tindakan yang harus diambil karena menurut dalil-dalil dan firman Allah dalam Al-Qur'an, pemimpin (negara) harus bersikap adil, jadi sudah seharusnya PMI legal maupun ilegal tetap diberikan perlindungan hukum. Kemudian penulis memberikan solusi dengan cara pemerintah harus melakukan pengawasan, pengecekan dan pemantau untuk PMI ilegal yang sudah berangkat dan berhasil lolos keluar negeri. Lalu dilakukan pendataan berapa banyak PMI ilegal di setiap negara dan diberikan pemenuhan hak asasi manusianya, seperti perlindungan keamanan, kesehatan dan keselamatan serta memberikan program pemutihan kepada PMI ilegal tersebut. Tidak hanya itu, dalam proses pemberian perlindungan hukum PMI ilegal di luar negeri juga dilakukan pengawasan dan pendataan secara ketat terkait pemberangkatan PMI ke luar negeri. Sehingga nantinya didapati semua PMI merupakan PMI legal dan dapat meminimalisir tindakan kekerasan dan kejahatan internasional yang memakan korban warga negara Indonesia.

## ABSTRACT

SAHRUL AZHAR SAHBUDDIN, 12103193191, Legal Protection for Indonesian Ilegal Migrant Workers Perspective of Fiqh Siyasah (Case Study in Tulungagung Regency), Constitutional Law Study Program, Faculty of Sharia and Legal Sciences, Sayyid Ali Rahmatullah State Islamic University Tulungagung, 2023, Supervisor: Muksin, M.H.

**Keywords:** Legal Protection, ilegal PMI, Tulungagung Regency

This research is motivated by the lack of legal protection for ilegal Indonesian migrant workers who have gone abroad. In the absence of legal protection, Indonesian citizens experience various kinds of international crimes and violence. Not only that, the absence of legal protection can threaten the human rights of ilegal Indonesian migrant workers. Even though migrant workers are ilegal, they must still receive legal protection because Indonesian migrant workers are also Indonesian citizens who have the same rights in Indonesia.

The focus of this research is on what legal protections are obtained by ilegal Indonesian migrant workers, especially migrant workers from Tulungagung Regency with a fiqh siyasah perspective, namely, what are the government's strategies and efforts to provide legal protection for ilegal migrant workers? How are the rights of ilegal Indonesian migrant workers protected and guaranteed in Tulungagung Regency? What is the legal protection for ilegal Indonesian migrant workers according to siyasah dusturiyah? The aim of this research is to find out how protection and guarantee of rights are received by Indonesian ilegal migrant workers, especially in Tulungagung Regency. Then to find out what the government's strategy and efforts are in providing legal protection for ilegal Indonesian migrant workers abroad. Also to understand the view of Islamic law, especially siyasah dusturiyah, regarding the protection of ilegal migrant workers.

The research method used in this research is empirical juridical research, using qualitative research methods and using descriptive and survey approaches, with the research location being in Tulungagung Regency. With data collection techniques in the form of observation, interviews and documentation. Not only that, in terms of data analysis techniques used are reduction, data presentation and drawing conclusions. Then, checking the validity of the data is done by triangulating the sources, namely comparing and counter-checking the degree of trustworthiness of the information obtained.

The results of this research show that, firstly, there is currently no legal protection received by ilegal PMI in Tulungagung Regency, because there is no data that states the exact number of ilegal PMI. So ilegal PMI must try independently to obtain legal protection or wait for the Indonesian government to

provide legal protection. Second, the efforts made by the government to provide legal protection to ilegal PMI in Tulungagung Regency include, a) seminars (understanding to the community), b) providing work competencies to increase opportunities to get work at home and abroad, and c) collaborating with a private Indonesian labor placement company (PPTKIS) in terms of making all departing PMIs legal PMIs. This is done so that all PMI can receive clear legal protection and not become victims of international crime or violence. Third, legal protection against ilegal PMI in Tulungagung Regency based on a fiqh siyasah perspective. Legal protection is given based on the arguments or words of Allah in the Koran regarding the performance of a leader who must be fair without discriminating against certain groups. Then the author provides a solution by means of which the government must supervise, check and monitor ilegal PMI who have departed and managed to escape abroad. Then data was collected on how many ilegal PMIs there were in each country and they were given the fulfillment of their human rights, such as protecting security, health and safety as well as providing a whitening program for these ilegal PMIs. Not only that, in the process of providing legal protection for ilegal PMI abroad, strict monitoring and data collection is also carried out regarding PMI departure abroad. So that later it will be found that all PMI are legal PMI and can minimize acts of violence and international crimes that claim victims of Indonesian citizens.

## خلاصة

سحر الأزهر صاحب الدين، 12103193191، الحماية القانونية للعمال المهاجرين غير الشرعيين الإندونيسيين من منظور فقه السياسة (دراسة حالة في مقاطعة تولونج أجونج)، برنامج دراسة القانون الدستوري، كلية الشريعة والعلوم القانونية، جامعة سيد علي رحمة الله الإسلامية الحكومية تولونج أجونج، 2023، المشرف: موكسين ، م.ح.

الكلمات المفتاحية: الحماية القانونية، مؤشر مديري المشتريات غير القانوني، مقاطعة تولونج أجونج.

الدافع وراء هذا البحث هو الافتقار إلى الحماية القانونية للعمال المهاجرين الإندونيسيين غير الشرعيين الذين ذهبوا إلى الخارج. وفي غياب الحماية القانونية، يواجه المواطنون الإندونيسيون أنواعًا مختلفة من الجرائم والعنف الدولي. ليس هذا فحسب، بل إن غياب الحماية القانونية يمكن أن يهدد حقوق الإنسان للعمال المهاجرين الإندونيسيين غير الشرعيين. على الرغم من أن العمال المهاجرين غير قانونيين، إلا أنهم لا يزالون بحاجة إلى الحصول على الحماية القانونية لأن العمال المهاجرين الإندونيسيين هم أيضًا مواطنون إندونيسيون يتمتعون بنفس الحقوق في إندونيسيا.

ينصب تركيز هذا البحث على الحماية القانونية التي يحصل عليها العمال المهاجرين الإندونيسيين غير الشرعيين، وخاصة العمال المهاجرين من مقاطعة تولونج أجونج من منظور فقه السياسة، أي كيف تتم حماية حقوق العمال المهاجرين الإندونيسيين غير الشرعيين وضمانها في مقاطعة تولونج أجونج؟ ما هي استراتيجيات الحكومة وجهودها لتوفير الحماية القانونية للعمال المهاجرين غير الشرعيين؟ ما هي الحماية القانونية للعمال المهاجرين الإندونيسيين غير الشرعيين وفقاً لسياسة الدستورية؟ الهدف من هذا البحث هو معرفة كيفية الحصول على الحماية وضمان الحقوق للعمال المهاجرين غير الشرعيين الإندونيسيين، وخاصة في منطقة تولونج أجونج. ثم لمعرفة استراتيجيات الحكومة وجهودها في توفير الحماية القانونية للعمال المهاجرين الإندونيسيين غير الشرعيين في الخارج. وكذلك لفهم وجهة نظر الشريعة الإسلامية، وخاصة السياسة الدستورية، فيما يتعلق بحماية العمال المهاجرين غير الشرعيين.

طريقة البحث المستخدمة في هذا البحث هي البحث القانوني التجريبي، باستخدام أساليب البحث النوعي واستخدام الأساليب الوصفية والمسحية، مع وجود موقع البحث في منطقة تولونج أجونج. مع تقنيات جمع البيانات في شكل ملاحظة

ومقابلات وتوثيق. ليس ذلك فحسب، فمن حيث تقنيات تحليل البيانات المستخدمة هي التخفيض وعرض البيانات واستخلاص النتائج. ومن ثم يتم التحقق من صحة البيانات من خلال تثلث المصادر، أي المقارنة والتحقق المضاد من درجة مصداقية المعلومات التي تم الحصول عليها.

تظهر نتائج هذا البحث، أولاً، أنه لا توجد حالياً أي حماية قانونية يتلقاها مؤشر مديري المشتريات غير القانوني في مقاطعة تولونج أجونج، لأنه لا توجد بيانات تحدد العدد الدقيق لمؤشر مديري المشتريات غير القانوني. لذلك يجب على شركة PMI غير القانونية أن تحاول بشكل مستقل الحصول على الحماية القانونية أو انتظار الحكومة الإندونيسية لتوفير الحماية القانونية. ثانياً، تشمل الجهود التي تبذلها الحكومة لتوفير الحماية القانونية لشركة PMI غير القانونية في مقاطعة تولونج أجونج ما يلي: (أ) الندوات (التفاهم للمجتمع)، (ب) توفير كفاءات العمل لزيادة فرص الحصول على عمل في الداخل والخارج، و (ج) التعاون مع شركة توظيف العمالة الإندونيسية الخاصة (PPTKIS) فيما يتعلق بجعل جميع مؤشرات مديري المشتريات (PMIs) المغادرة غير قانونية. ويتم ذلك حتى تتمكن جميع شركات PMI من الحصول على حماية قانونية واضحة وعدم الوقوع ضحايا للجريمة أو العنف الدولي. ثالثاً، الحماية القانونية ضد PMI غير القانوني في محافظة تولونج أجونج بناءً على منظور فقه السياسة. يتم توفير الحماية القانونية بناءً على حجج الله أو كلامه في القرآن فيما يتعلق بأداء القائد الذي يجب أن يكون عادلاً دون تمييز ضد مجموعات معينة. ثم يقدم المؤلف حلاً يجب من خلاله على الحكومة الإشراف والتحقق والمراقبة من PMI غير القانونيين الذين غادروا وتمكنوا من الهروب إلى الخارج. ثم تم جمع البيانات حول عدد شركات PMI غير القانونية الموجودة في كل بلد وتم منحهم استيفاء حقوقهم الإنسانية، مثل حماية الأمن والصحة والسلامة بالإضافة إلى توفير برنامج تبييض لهذه PMI غير القانونية. ليس هذا فحسب، ففي عملية توفير الحماية القانونية لشركة PMI غير القانونية في الخارج، يتم أيضاً إجراء مراقبة صارمة وجمع البيانات فيما يتعلق بمغادرة PMI إلى الخارج. بحيث يتبين لاحقاً أن جميع PMI هي PMI قانونية ويمكنها تقليل أعمال العنف والجرائم الدولية التي تحصد أرواح المواطنين الإندونيسيين.